

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1    Kejahatan terhadap Karya Seni**

Kejahatan terhadap karya seni dapat didefinisikan secara sederhana sebagai "tindakan yang dapat dihukum secara pidana yang melibatkan karya seni". Definisi sederhana tersebut terdapat pada buku "*Art Crime*" karya J. E. Conklin (1994), dimana kejahatan seni awalnya diklasifikasikan ke dalam empat kategori umum:

- Pencurian karya seni dan barang antik
- Penjarahan dan perampokan barang antik
- Vandalisme
- Pemalsuan dan Peniruan

Banyak penulis saat ini menggunakan istilah "*art and heritage crime*" untuk memberikan definisi yang lebih menekankan sifat tidak berwujud dari warisan tersebut (Oosterman, 2022). Kejahatan seni telah dianggap sebagai kejahatan tanpa korban, tetapi seperti yang ditunjukkan dengan sangat jelas oleh karya-karya yang disajikan di sini, kerusakan yang disebabkan oleh jenis kejahatan ini sering kali sangat mengancam komunitas lokal, ekologi, warisan nasional, dan identitas masyarakat (Conklin, 1994). Selain itu, barang-barang budaya sering menjadi sasaran *Transnational Organized Crime* (TOC) untuk melakukan aksinya, seperti pencurian dan pemalsuan karena nilai ekonomisnya yang tinggi (Ulph & Smith, 2012).

Sejarah mencatat banyak kasus di mana karya seni curian atau palsu diperdagangkan di pasar gelap, menyebabkan kerugian signifikan bagi kolektor dan institusi seni (Fletcher, 2023). Dalam artikel yang dipublikasi oleh Sotheby's Institute of Art (2023) yang berjudul "Theft, Fakes and Forgery...Understanding Art Crime in a Global Art Market", Gareth Fletcher, seorang Pengajar di Sotheby's Institute yang memimpin kursus daring tentang Kejahatan Seni, yang juga merupakan ahli seni dan pasarnya, berpendapat bahwa terdapat tiga aspek utama dalam kejahatan terhadap karya seni:

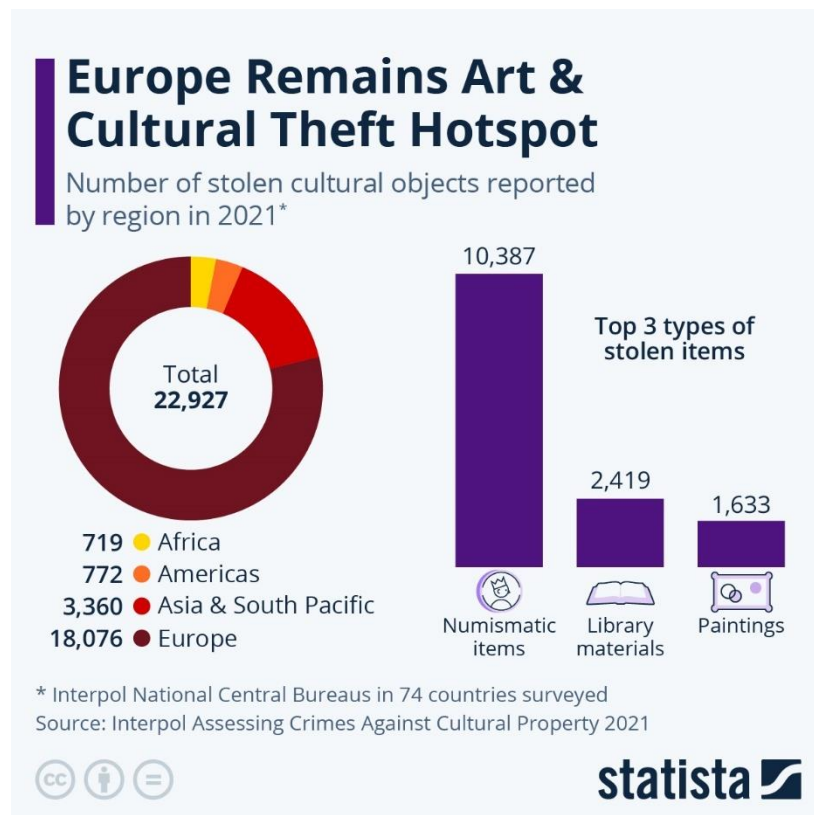
**Tabel 2.1** Tiga aspek utama dalam kejahatan terhadap karya seni menurut Gareth Fletcher (2023).

| <b>Jenis Kejahatan</b>      | <b>Penjelasan</b>                                                                                                                                 | <b>Contoh Kasus</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pencurian dengan "penipuan" | Pemalsuan, barang palsu, kejahatan kerah putih seperti pencucian uang, manipulasi sejarah kepemilikan, dan proses perdagangan gelap objek budaya. | Sotheby's Institute of Art menyebutkan statistik yang sering dikutip bahwa 10 persen karya di museum adalah palsu.                                                                                                                                   |
| Pencurian dengan "mencuri"  | Pencurian karya seni dan akuisisi ilegal objek dari museum/koleksi publik.                                                                        | Contoh sejarah dari pencurian dengan mencuri yaitu termasuk karya ikonik seperti Mona Lisa yang terkenal atau The Scream karya Munch. Baru-baru ini, beberapa karya Vincent Van Gogh dikembalikan ke museum Belanda, 14 tahun setelah mereka dicuri. |

|                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pencurian dengan “perusakan” | Tindakan destruktif dan perampasan terhadap barang budaya maupun karya seni, yang umumnya terjadi di negara-negara yang sedang dilanda perang. | Museum Kebudayaan Mosul di Irak mengalami kerusakan besar akibat aksi ISIS, di mana para militan menghancurkan artefak Asiria yang sangat berharga dengan maksud untuk menghapus warisan pra-Islam di wilayah tersebut. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Sumber: Sotheby’s Institute of Art. (2023). Theft, Fakes, and Forgery. Understanding art crime in a global art market. Sotheby’s Institute of Art.*

Keragaman dari kejahatan seni itulah yang telah menarik semakin banyak keterlibatan penegak hukum untuk melawannya, sehingga isu tersebut dapat menjadi sebuah tindak kejahatan serius (Fletcher, 2023). Berbagai negara menerapkan strategi yang berbeda untuk menanggulangi kejahatan ini, mulai dari intervensi penegakan hukum, pengembangan kebijakan dan undang-undang, alat bantu, kampanye kesadaran publik, hingga sistem identifikasi otomatis (Oosterman, 2022). Namun, keragaman dalam definisi dan kategori kejahatan seni membuat kejahatan ini, yang sering kali bersifat transnasional, sulit untuk diawasi dan dicegah (Oosterman, 2022).



**Gambar 2.1** Statistik jumlah dicurinya benda budaya berdasarkan tiap kawasan pada tahun 2021.

Sumber: Zandt, F. (2023). *Europe remains art & cultural theft hotspot*. Statista Daily Data.

Dengan meningkatnya nilai barang-barang budaya di pelelangan, tidak mengherankan jika pencurian properti budaya menjadi bisnis yang berkembang pesat. Berdasarkan edisi terbaru laporan tahunan Interpol “*Assessing Crimes Against Cultural Property*” yang dirilis pada Oktober 2022, sekitar 23.000 artefak dilaporkan hilang di 74 negara yang disurvei pada tahun 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pencurian terjadi di Eropa, yang merupakan lokasi dari museum seni dan sejarah terkemuka seperti British Museum, Tate Modern, dan Musée du Louvre (Zandt, 2023).

Sekitar 18.000 artefak, atau 78 persen dari total pencurian yang tercatat, dilaporkan oleh Biro Pusat Nasional Interpol di negara-negara Eropa.

Kawasan Asia dan Pasifik Selatan menempati posisi berikutnya, dengan 40 persen barang yang dicuri berupa bahan perpustakaan. Sementara itu, 53 persen barang curian di Eropa dan 95 persen di Afrika diklasifikasikan sebagai barang numismatik. Meskipun publik umumnya mengaitkan pencurian budaya dengan lukisan dan patung, koleksi koin juga sering menjadi target utama bagi para pelaku kejahatan. Sebagai contoh, satu keping koin “Brasher Doubloon” tahun 1787 berhasil dilelang dengan harga hampir 10 juta dolar AS pada tahun 2021 (Zandt, 2023). Meskipun pencurian seni merupakan masalah global, perdebatan mengenai kepemilikan benda-benda budaya mengalami pergeseran dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam konteks meningkatnya kajian pasca-kolonial, sejumlah pihak mengkritik museum-museum besar karena menyimpan artefak-artefak budaya yang diperoleh dari bekas wilayah koloni, sering kali melalui jalur yang dipertanyakan dan terkait dengan kejahatan kolonialisme (Zandt, 2023). Beberapa institusi besar telah mulai mengubah kebijakan mereka terkait hal ini, meskipun ada satu pengecualian penting, yaitu British Museum, yang menganggap pengembalian artefak ke negara asalnya sebagai tindakan ilegal berdasarkan *British Museum Act* tahun 1963 (Zandt, 2023). Salah satu contoh kasus yang kontroversial adalah *Parthenon Marbles*, yang berasal dari Yunani. Sebuah jajak pendapat YouGov tahun 2021 menunjukkan bahwa 59 persen responden berpendapat artefak tersebut lebih tepat dikembalikan ke Yunani dibandingkan tetap berada di Inggris (Zandt, 2023).

Contoh lain yang menyorot perhatian adalah kasus *Benin Bronzes*, yaitu ribuan patung dari Kerajaan Benin yang tersebar di berbagai museum di seluruh dunia, namun jarang ditemukan di Afrika. Sejak tahun 2021, beberapa museum di Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat telah memulai proses pengembalian sebagian atau seluruh koleksi *Benin Bronzes* ke Nigeria, di mana Kerajaan Benin pernah berdiri sebelum dianeksasi oleh Inggris pada tahun 1897 (Zandt, 2023). Namun, patung-patung ini sekarang dimiliki oleh koleksi pribadi Keluarga Kerajaan Benin, bukan di museum atau institusi publik, yang menyebabkan sejumlah kritikus menilai bahwa upaya restitusi tersebut tidak sepenuhnya berhasil (Zandt, 2023).

## **2.2 Kejahatan Pencucian Uang di Pasar Seni**

Di balik keindahan dan prestise dunia seni, terdapat celah baru bagi metode kejahatan terhadap seni, yaitu pencucian uang. Melalui transaksi yang melibatkan karya seni bernilai tinggi, pelaku kejahatan dapat menyamarkan asal-usul dana ilegal mereka, mengubahnya menjadi aset yang tampak sah (Ulph, 2011). Transaksi karya seni juga dapat dilakukan secara pribadi oleh pembeli anonim yang membayar mahal untuk karya seni yang mungkin dijarah, tidak terdokumentasi, atau bahkan mungkin tidak asli (Ulph & Smith, 2012). Tetapi asal usul karya tersebut seharusnya tidak menjadi satu-satunya hal yang harus dilihat saat menghindari kejahatan terkait seni.

Hal ini yang menjadikan celah utama dalam kejahatan di pasar ini ialah pedagang seni tidak diwajibkan untuk mengungkapkan identitas pembeli mereka dan dari mana sumber kekayaan yang mereka miliki (FATF, 2023). Dana ilegal yang dicuci

melalui pasar ini berasal dari berbagai kejahatan yang memberikan dampak merugikan yang signifikan bagi masyarakat, seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan keuangan (FATF, 2023). Risiko pendanaan terorisme juga menjadi perhatian utama, terutama dalam perdagangan objek budaya. Seperti misalnya, Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) dikenal menjarah situs arkeologi penting di Suriah dan Irak, memanfaatkan hasil penjualan dan pajak dari aktivitas penggalian untuk mengumpulkan dana (FATF, 2023).

Meskipun wilayah kekuasaan ISIL telah berkurang, kelompok ini dan afiliasinya masih menguasai beberapa wilayah, yang memungkinkan mereka untuk tetap mengakses situs warisan budaya atau artefak yang bernilai tinggi (FATF, 2023). Kelompok teroris lainnya, seperti Al-Qaeda dan afiliasinya, juga menggunakan taktik serupa di Timur Tengah, Afrika Utara, dan beberapa bagian Asia (FATF, 2023). Dalam beberapa kasus, kelompok kejahatan terorganisir transnasional bekerja sama dengan kelompok teroris untuk memperoleh dan menyelundupkan barang-barang tersebut dari wilayah konflik. Mereka sering menggunakan teknik pencucian uang yang umum, seperti perusahaan cangkang dan transaksi tunai, untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul barang-barang tersebut (FATF, 2023).

Hasil kriminal atau karya seni atau barang antik yang dicuri dapat diperkenalkan ke pasar (dikenal sebagai tahap "Penempatan" dalam pencucian uang) dan selanjutnya berpindah tangan melalui *proxy* yang disiapkan untuk transaksi (dikenal sebagai tahap "*Layering*" dalam pencucian uang) (Ulph, 2011). Tidak seperti pasar lain yang diatur oleh undang-undang *Anti-Money Laundering* dan *Countering the*

*Financing* (“AML/CFT”), karya seni dapat dibeli seharga setengah juta dolar tanpa menunjukkan paspor dan mengirimkannya ke yurisdiksi yang menawarkan *Free Port* untuk menyimpan karya-karya itu di gudang yang seringkali disebut sebagai "surga pajak" (Saleeby, 2023). Penjahat dapat dengan mudah melakukan banyak transaksi untuk memisahkan dana terlarang dari sumbernya di berbagai pasar dan perbatasan. *Free Port* ada di banyak yurisdiksi, seperti contohnya di Singapura dan Hong Kong (Hufnagel & King, 2019).

Gudang *Free Port* umumnya digunakan untuk menyimpan karya seni yang dibeli. penggunaan *Free Ports* yang dapat dimanfaatkan secara anonim oleh para pelaku kejahatan (Ulph & Smith, 2012). *Free Port* adalah fasilitas penyimpanan yang beroperasi di luar yurisdiksi wilayah negara mana pun, menyediakan lingkungan yang aman dan bebas pajak untuk menyimpan dan memperdagangkan karya seni yang berharga (Zarobell, 2020). *Free Port* dirancang untuk memfasilitasi pasar seni global dengan menyediakan lingkungan yang aman, bebas pajak, dan bebas bea untuk menyimpan dan memperdagangkan karya seni berharga (Saleeby, 2023). Selain itu mereka menawarkan berbagai layanan, termasuk keamanan, restorasi, bingkai, otentikasi, evaluasi, dan transportasi khusus, menjadikannya pilihan menarik bagi kolektor seni dan investor yang ingin diversifikasi portofolio mereka (Zarobell, 2020). Di lokasi-lokasi ini, barang diklasifikasikan sebagai "sedang dalam perjalanan" dan terbebas dari bea cukai, menjadikannya tempat perlindungan pajak bagi pembeli yang sah serta oligarki dan raja narkoba dengan niat pencucian uang.

Di lain sisi, karya seni yang disimpan di *Free Port* juga secara teknis dapat mengalami perubahan kepemilikan berkali-kali melalui penjualan dan pembelian kembali, menempatkan jarak lebih jauh antara transaksi terbaru dan asal-usul dana ilegal (Zarobell, 2020). Kemudian, terkadang penipu mengisi dokumen palsu atau faktur pengiriman palsu untuk menyelundupkan karya seni curian dan palsu ke negara-negara di mana mereka kemudian dijual. Menurut laporan Financial Action Task Force (2023), beberapa studi kasus menunjukkan bahwa ini merupakan metode umum pendanaan teroris, terutama dengan barang-barang antik atau objek budaya yang fisiknya kecil dan menarik perhatian lebih sedikit. Dalam memuluskan rencananya, para penjahat sering menggunakan perantara seperti perusahaan cangkang atau organisasi nirlaba (NPOs) untuk menyamarkan transfer karya seni bernilai tinggi, menyembunyikan sumber dana, dan menyembunyikan identitas penjual dan pembeli (FATF, 2023).

Harga yang fleksibel dan terdapat anonimitas dalam proses pembelian karya seni, membuat pasar seni dan barang antik menjadi tempat menarik bagi para penjahat untuk mencuci uang. Menurut laporan FATF tahun 2023, nilai pasar seni global meningkat dari \$441 miliar pada 2022 menjadi \$579 miliar pada 2023, dengan Asia-Pasifik menjadi wilayah terbesar (FATF, 2023). Volume aktivitas yang tinggi di pasar seni global membuatnya rentan terhadap penyalahgunaan potensial, seperti yang dicatat oleh Financial Action Task Force (FATF) dalam panduan tahun 2023. UNODC juga melaporkan bahwa pada tahun 2019 sekitar \$3 miliar uang yang beredar di dunia seni dikaitkan dengan pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya (Hufnagel &

King, 2019). Dengan regulasi anti-pencucian uang (AML) yang terus diperbaharui dan diperketat, beberapa metode pencucian uang yang lebih "klasik", seperti investasi di real estat, mungkin kurang diminati oleh para pelaku kejahatan.

Namun, pencucian uang melalui seni masih menarik karena harga seni yang cenderung berubah dikarenakan kurangnya regulasi yang mengikat para penjual dan pembeli dalam pasar seni (FATF, 2023). Anonimitas merupakan salah satu alasan utamanya, dimana tak ada nya regulasi terkait pembeli anonim dalam perdagangan karya seni di banyak yurisdiksi memungkinkan para penjahat untuk tetap anonim dalam pelelangan melalui agen, broker, penasihat, dan perantara lain yang disewa untuk mewakili mereka (FATF, 2023). Hal ini dapat menyulitkan bagi para pelaku pasar seni untuk sepenuhnya memahami dengan siapa mereka berurusan.

Dilansir dari Laporan Financial Action Task Force (FATF) yang berjudul “Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market” yang dirilis pada tahun 2023, Terdapat banyak tantangan dalam menangani pencucian uang dan pendanaan terorisme di pasar seni, barang antik, dan objek budaya lainnya. Tantangan ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

**Tabel 2.2** Kategori tantangan dalam penanganan *Money Laundering* dan *Terrorist Financing* menurut FATF (2023).

| Kategori Pertama<br>(Jenis Objek dan Sifat Pasar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kategori Kedua<br>(Tantangan Investigatif)                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesulitan dalam melacak asal usul objek budaya,</li> <li>• Sejarah privasi dan penggunaan perantara pihak ketiga di sektor ini,</li> <li>• Tindakan yang tidak memadai, atau bahkan tidak ada sama sekali, untuk mengidentifikasi dan memverifikasi pelanggan,</li> <li>• Jumlah laporan transaksi mencurigakan yang rendah yang diajukan kepada Unit Intelijen Keuangan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya prioritas dalam penyelidikan di bidang ini,</li> <li>• Terbatasnya sumber daya, kesadaran, dan keahlian oleh otoritas operasional,</li> <li>• Kesulitan dalam penyelidikan lintas batas.</li> </ul> |

*Sumber: FATF (2023), Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market, FATF, Paris, France.*

Inflasi harga pada karya seni juga salah satu celah, dikarenakan proses penilaian karya seni tidak diatur, para penjahat dan rekannya sering menggunakan ini sebagai kesempatan untuk sengaja menaikkan harga lelang, memungkinkan mereka mencuci uang dalam jumlah besar dalam satu penjualan (Tracy & Hrbek, 2024). Financial Action Task Force (FATF) menyoroti beberapa studi kasus dalam laporannya tahun 2023, yang menunjukkan pejabat korup menerima karya seni bernilai tinggi sebagai suap atau imbalan bukan menerima pembayaran langsung melalui sistem keuangan. Metode ini memungkinkan pihak yang terlibat untuk menghindari memindahkan dana antara rekening bank, mempersulit upaya pelacakan dana (FATF, 2023).

Transaksi karya seni juga dapat dilakukan secara pribadi oleh pembeli anonim yang membayar mahal untuk karya seni yang mungkin dijarah, tidak terdokumentasi, atau bahkan mungkin tidak asli (FATF, 2023). Tetapi asal usul karya tersebut seharusnya tidak menjadi satu-satunya hal yang harus dilihat saat menghindari kejahatan terkait seni. Hal ini yang menjadikan celah utama dalam kejahatan di pasar ini ialah pedagang seni tidak diwajibkan untuk mengungkapkan identitas pembeli mereka dan dari mana sumber kekayaan yang mereka miliki (Hufnagel & King, 2019). Organisasi teroris yang mengontrol situs kuno diketahui juga menjual relik yang dijarah dari situs tersebut untuk mendapatkan dana. Penjahat juga memanfaatkan nilai seni yang berpotensi tinggi dan dari kurangnya praktek perdagangan yang transparan untuk memproses pencucian uang. Mengevaluasi nilai karya seni tunduk pada fleksibilitas harga yang sangat besar, dan pasar seni memungkinkan pembeli dengan anonimitas untuk membeli transaksi tunai dalam jumlah besar. Hal tersebut sangat sesuai dengan apa yang diinginkan para penjahat untuk berdagang tanpa diekspos, terutama melalui pelelangan karya seni.

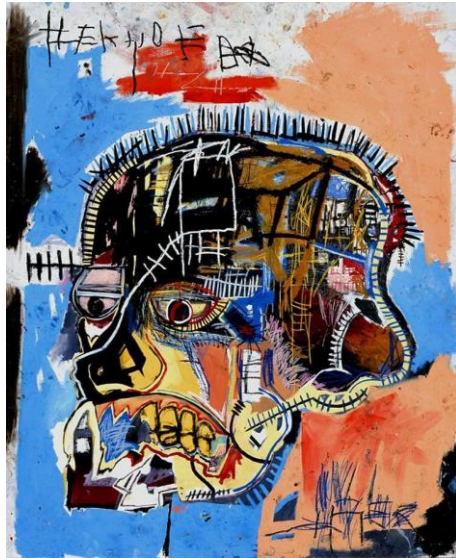


**Gambar 2.2** Foto penemuan bukti uang ilegal Ronald Belciano.

*Sumber: U.S. Immigration and Customs Enforcement. (2015). ICE Philadelphia's largest cash seizure yields Main Line drug trafficker, money launderer 5 years in prison. U.S. Immigration And Customs Enforcement.*

Di dalam dari artikel yang dipublikasikan oleh IMF di tahun 2019 yang berjudul “*The Art of Money Laundering*”, dijelaskan bahwa sudah terdapat bukti bentuk kejahatan pencucian uang melalui karya seni yang sudah terkuak dari beberapa kasus. Pada tahun 2014, terdapat sebuah kasus yang dikenal sebagai *U.S. v. Ronald Belciano et al.*, yang melibatkan distribusi mariyuana dan konspirasi untuk mencuci keuntungan dengan menggunakan karya seni (U.S. Immigration and Customs Enforcement, 2015). Pihak kepolisian setempat menyita lebih dari \$4 juta dalam bentuk tunai dan mengamankan sekitar 125 pon mariyuana serta 33 lukisan senilai lebih dari \$619.000 dari sebuah gudang penyimpanan di Pennsylvania (IMF, 2019). Jaksa mengatakan bahwa para pengedar narkoba menerima karya seni sebagai pengganti uang tunai

setelah dijanjikan bahwa mereka dapat menjual kembali karya seni tersebut untuk mendapatkan uang hasil pencucian setelah transaksi tersebut disembunyikan dalam pembukuan para pedagang seni (U.S. Immigration and Customs Enforcement, 2015). Pada tahun 2015, Belciano dijatuhi hukuman lima tahun penjara (IMF, 2019).



**Gambar 2.3** Jean-Michel Basquiat, *Hannibal* (1981), digunakan dalam skema pencucian uang pada tahun 2007.

*Sumber: Kinsella, E. (2015). Bad Banker's \$8 Million Basquiat Smuggled With Shipping Invoice for \$100 Returns Home. Artnet News.*

Lukisan *Hannibal* (1981) karya Jean-Michel Basquiat ini menjadi pusat perhatian dari kasus hukum karena berkaitan dengan penyelundupan karya seni dan pencucian uang (Kinsella, 2015). Lukisan yang bernilai sekitar \$8 juta ini dikembalikan ke Brasil dalam sebuah upacara repatriasi setelah sebelumnya diselundupkan secara ilegal ke Amerika Serikat (Kinsella, 2015). Karya seni ini awalnya dimiliki oleh Edemar Cid Ferreira, seorang bankir Brasil yang dihukum pada tahun 2006 atas kejahatan keuangan dan kini menjalani hukuman penjara selama 21 tahun. Aset-

asetnya, termasuk *Hannibal* dan sebuah patung Romawi, disita oleh otoritas AS setelah terungkap bahwa barang-barang tersebut diselundupkan ke AS dengan keterangan yang menyesatkan, di mana faktur pengiriman hanya mencantumkan nilai \$100, jauh di bawah nilai aslinya (Kinsella, 2015). Kantor Jaksa Distrik AS untuk Distrik Selatan New York menyatakan bahwa penyitaan ini dilakukan karena pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanan, menyusul perintah pencarian dan penyitaan dari hakim di Sao Paulo, yang mencurigai aset-aset tersebut diperoleh secara ilegal (Kinsella, 2015). Setelah penyelidikan yang melibatkan kerja sama dengan Interpol, karya seni ini ditemukan di sebuah fasilitas penyimpanan aman di New York, tempat mereka disimpan sejak tiba dari Belanda pada tahun 2007 (Kinsella, 2015).

Dilansir pada artikel berita Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang berjudul “*Art and Antiquities an Attractive Market for Money Laundering, FATF Argues*” yang dirilis pada tahun 2023, menuliskan hasil wawancaranya dengan Sam Hardy, seorang kriminologis properti budaya di Rey Juan Carlos University dan the Norwegian Institute of Cultural Heritage Research, terkait pendapatnya mengenai pencucian uang melalui karya seni (Pope, 2023). Beliau memberikan catatan bahwa meskipun pihak berwenang menuntut kasus yang melibatkan seni dan barang antik dalam kegiatan kriminal, hukuman yang diberikan jarang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. "Bahkan jika mereka mengaku bersalah atau diadili dan terbukti bersalah, kemungkinan besar mereka hanya akan dikenai denda," ungkapnya kepada pihak OCCRP pada wawancaranya (Pope, 2023). Salah satu penjelasan untuk hal ini adalah karena pencucian uang hampir selalu terkait

dengan tindakan kriminal sebelumnya (Pope, 2023). Menghubungkan semua bukti menjadi tantangan tersendiri bagi para penyelidik, yang terkadang harus puas dengan tuntutan yang lebih ringan (Pope, 2023).

Oleh karena itu isu tersebut, diperlukannya sebuah hukum dan regulasi yang dapat meminimalisir maupun menangani potensi kejahatan pencucian uang yang memanfaatkan karya seni sebagai media pencuciannya. Kawasan Eropa sendiri yang merupakan salah satu pusat aktivitas seni dunia memiliki landasan hukumnya tersendiri dalam menangani isu tersebut (Jourová, 2018). Landasan tersebutlah yang akan menjadi alasan dibentuknya kebijakan Uni Eropa *Anti-Money Laundering Directive*, guna memerangi kejahatan pencucian uang.

### **2.3 European Union Anti-Money Laundering Directive (AMLD) - the Fifth**

Arahan Anti-Pencucian Uang (AMLD) Uni Eropa merupakan serangkaian kerangka regulasi yang dirancang untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme di seluruh negara anggota. Perjalanan evolusi arahan ini dimulai dengan AMLD pertama pada tahun 1991, yang menetapkan persyaratan dasar untuk uji tuntas pelanggan dan pencatatan, dengan fokus utama pada lembaga perbankan (European Union, n.d.). Seiring berjalannya waktu, arahan-arahan berikutnya memperluas cakupan kewajiban, mencakup entitas yang lebih beragam seperti notaris, auditor, serta bursa *cryptocurrency* dan pedagang seni dalam perkembangan terkini. Setiap arahan membangun landasan dari arahan sebelumnya, mengatasi kekurangan dalam

kepatuhan, dan beradaptasi dengan ancaman keuangan baru, termasuk kemunculan mata uang digital dan perdagangan barang-barang bernilai tinggi.

Arahan-arahan terbaru, termasuk AMLD ke-5 dan ke-6, memperkenalkan reformasi yang signifikan, seperti kewajiban penerapan uji tuntas yang lebih ketat terhadap klien dari negara-negara berisiko tinggi, serta penambahan tindak pidana baru seperti kejahatan siber dan lingkungan (European Union, n.d.). AMLD ke-6, yang diberlakukan pada tahun 2021, menekankan pada peningkatan akuntabilitas perusahaan dan individu yang terlibat dalam praktik pencucian uang, dengan memperluas definisi tindak pidana dan meningkatkan sanksi (European Union, n.d.). Perkembangan ini mencerminkan komitmen Uni Eropa untuk membangun lingkup regulasi yang kuat dan adaptif, yang mampu mengatasi kompleksitas transaksi keuangan modern serta memperkuat kerja sama antarnegara anggota dalam upaya efektif melawan kejahatan keuangan (European Union, n.d.).

Dalam menggantikan kebijakan Direktif sebelumnya yaitu Anti Pencucian Uang Uni Eropa Keempat (AMLD-4), yang telah berlaku sejak tahun 2015, AMLD-5 memiliki cakupan yang luas, menargetkan pencucian uang dalam berbagai sektor yang berbeda. Kebijakan direktif AML Keempat, memperluas persyaratan *Know Your Customer* (KYC) untuk banyak industri, seperti penjualan real estat dan perbankan, tidak menargetkan industri seni. Sedangkan Direktif Kelima memperluas harapan *Know Your Customer* (KYC) dan persyaratan lainnya kepada *dealer* seni dan penyedia layanan lainnya dan memperkenalkan langkah-langkah *due diligence* yang

ditingkatkan untuk memantau transaksi mencurigakan yang melibatkan negara-negara anggota Uni Eropa "berisiko tinggi" (European Commission, 2018).

Menurut European Commission (2018) secara khusus Kebijakan AMLD-5 mensyaratkan bahwa *dealer* seni harus mematuhi peraturan - peraturan berikut:

- ***Know Your Customer (KYC):***

Kebijakan direktif Kelima sekarang memerlukan *dealer* seni untuk memverifikasi identitas siapa pun yang membeli karya seni senilai €10.000 atau lebih, tidak peduli apapun metode pembayarannya. Sedangkan pada kebijakan Direktif Keempat hanya berlaku untuk pembayaran tunai dan tidak menentukan *dealer* seni untuk melakukan kewajiban pemeriksaan tersebut. Proses identifikasi ini mencegah pembeli anonim dari menyembunyikan diri di balik agen pribadi, karena regulasi menuntut identitas sang *beneficial owner* dari transaksi tersebut.

- ***Due Diligence yang Ditingkatkan:***

Penjual diwajibkan untuk mengidentifikasi sumber kekayaan klien mereka sebagai bagian dari standar *diligence* yang lebih tinggi yang diperlukan oleh kebijakan direktif Kelima. Meskipun penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencegah pencucian uang, penyelidikan tersebut dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan persyaratan *due diligence* yang ditingkatkan ini dapat menyebabkan implikasi lebih lanjut untuk kepatuhan proteksi data. Transaksi "berisiko tinggi," seperti yang melibatkan artefak budaya atau barang-barang

lain yang memiliki signifikansi budaya, sejarah, atau lainnya, juga memerlukan langkah-langkah tambahan dalam *due diligence*, begitu juga penjualan yang melibatkan negara-negara berisiko tinggi.

Sebagian besar kebijakan direktif Kelima mendorong pendekatan berbasis risiko terhadap transaksi untuk meminimalkan risiko pencucian uang, yang menjadi kekhawatiran yang berkembang di banyak pemerintah nasional. Pendekatan berbasis risiko meminta penyedia layanan untuk mengambil tanggung jawab dalam mengumpulkan informasi yang cukup tentang pelanggan dan penjualan untuk memahami risiko yang terlibat dan memitigasi risiko potensial ini. Dilansir dari Center for Art Law (2019), The Responsible Art Market Initiative (RAM) yang berbasis di Swiss, membuat alat dengan daftar periksa untuk membantu profesional pasar seni dalam melakukan *due diligence* terhadap klien dan mengumpulkan informasi lain yang diperlukan dalam kebijakan direktif Kelima ini. Alat ini mencatat "*redflag*" potensial untuk sebuah transaksi, seperti provenans (asal-usul karya seni/benda budaya) yang tidak lengkap, penjual yang mengubah ceritanya tentang bagaimana mereka memperoleh karya tersebut, atau keberadaan perusahaan luar negeri atau *trust* untuk menahan aset saja. RAM juga menawarkan materi lain bagi mereka di pasar seni saat mereka beralih untuk mematuhi harapan baru.

- **Politically Exposed Persons (PEPs):**

Kebijakan direktif ini mengharuskan pembuatan dan pemeliharaan daftar terkini dari fungsi publik terkemuka, termasuk di tingkat institusi dan badan UE. Untuk mengidentifikasi orang yang terpapar secara politik di Uni Eropa, negara-negara anggota harus menerbitkan daftar yang mencantumkan fungsi-fungsi spesifik yang sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan ketentuan administratif nasional, sehingga dapat dikategorikan sebagai fungsi publik terkemuka. Negara-negara anggota juga harus meminta setiap organisasi internasional yang terakreditasi di wilayah mereka untuk menerbitkan dan memperbarui daftar fungsi publik terkemuka di organisasi internasional tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk meninjau pelanggan yang ada dalam kerangka kerja saat ini didasarkan pada penilaian risiko. Namun, mengingat tingginya risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana terkait yang berhubungan dengan struktur perantara tertentu, pendekatan ini mungkin tidak memungkinkan deteksi dan penilaian risiko secara tepat waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa kategori tertentu dari pelanggan yang ada, yang telah ditentukan secara jelas, juga dipantau secara berkala.

- **Mata Uang dan Dompot Virtual:**

Anonimitas yang terkait dengan mata uang virtual dan *provider* dompot virtual dibatasi, dan entitas ini diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan AML yang mirip dengan institusi keuangan tradisional.

- **Negara Ketiga yang Berisiko Tinggi:**

Kebijakan direktif ini memperluas kriteria untuk menilai negara ketiga yang berisiko tinggi, yaitu yurisdiksi negara-negara yang teridentifikasi defisiensi sistem anti-pencucian uang yang signifikan. Oleh karena itu, dalam kebijakan AMLD-5 ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan pada transaksi keuangan ke dan dari negara-negara tersebut.

- **Kerja Sama dan Berbagi Informasi:**

Kebijakan direktif ini meningkatkan kerja sama antara FIU, Bank Sentral Eropa, dan otoritas terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah AML dan CTF.